

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Multikultural

1. Dua Pengertian

Mulanya konsep pendidikan multikultural dikenal di Amerika. Kendatipun terdapat perbedaan pengertian yang diberikan oleh para ahli akan tetapi mereka memiliki kesamaan definisi yang dilatar belakangi oleh kultur Amerika. Sebagai misal pengertian yang diberikan oleh Sleeter (Burnet, 1994:1) bahwa pendidikan multikultural adalah *any set of process by which schools work with rather than against oppressed group*. Pengertian ini tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan di Indonesia, karena kendatipun Amerika dan Indonesia memiliki keragaman budaya yang plural akan tetapi memiliki konteks budaya yang berbeda.

Jika dicermati, pengertian di atas sangat syarat nuansa politis. Begitulah konteks latar belakang budaya Amerika yang bercorak WASP (kependekan dari *white Anglo Saxon Protestant*), adalah budaya dominan yang sering memperagakan praktik diskriminasi bahkan *repressi* terhadap kelompok minoritas. (Tilaar, 2002:495)

Pengertian pendidikan multikultural yang luas diberikan oleh Andersen dan Cusher (1994:320) yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Menurut pengertian ini keragaman kebudayaan merupakan sesuatu yang dipelajari atau menjadi objek studi. Dibandingkan dengan pengertian sebelumnya pengertian Andersen lebih berorientasi pada *subject matter* dibandingkan Sleeter yang menekankan pada orientasi/tujuan pendidikan.

Dari kedua pengertian dapat dipahami bahwa pendidikan multikultur secara fungsional dapat diposisikan sebagai isi pembelajaran (*subject matter*) artinya keragaman budaya menjadi isi kurikulum dalam arti terbatas bahan pembelajaran. Adapun posisi lain adalah sebagai pendekatan yang berimplikasi pada corak wawasan dalam pendidikan, artinya mencakup seluruh kurikulum pendidikan dalam pengertian luas.

2. Tujuan atau Orientasi

Menurut Fakhri (Machali, 2004: 270) orientasi pendidikan multikultur adalah memanusiakan kemanusiaan manusia yang pada dasarnya adalah pengakuan atas pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman bisa berupa ideologi, agama, paradigma, pola pikir, kebutuhan, keinginan, tingkat ekonomi, strata sosial, suku, etnis, ras, budaya, nilai-nilai tradisi dan sebagainya. Menilik pengertian tersebut tampak Fakhri cenderung menggunakan perspektif Antropologis, dimana peserta didik/belajar akan disempurnakan eksistensinya sebagai makhluk berbudaya yang pada dirinya dan entitasnya melekat keragaman budaya.

Dengan membandingkan antara program pendidikan *interkultural* dengan *multikultural*, Tilaar mengemukakan bahwa program yang pertama ditekankan kepada nilai-nilai budaya Barat, adapun program pendidikan multikultural melihat permasalahan masyarakat secara lebih luas. Bukan hanya mengusung isu masalah struktural ras, tetapi juga mempersoalkan masalah kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam ilmu pengetahuan (Tilaar, 2004:498)

3. Urgensi Pendidikan Multikultural

Menilik karakter pendidikan multikultural yang berorientasi pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan semesta, maka sangat kontras dibandingkan dengan *Radikalisme* yang tumbuh dalam kelompok-kelompok masyarakat yang secara politis merasa dimarginalkan. Kelompok ini karena merasa tidak diakomodasi aspirasinya untuk turut mengelola peradaban, menjadi kelompok yang justru memiliki spirit fanatik terhadap budayanya. Kelompok ini menjadi militan, dan pada umumnya memiliki empat karakter: *Pertama*, unifikatif. Kelompok militan sering tidak membedakan antara agama dan keberagaman. Dengan kata lain, tidak dapat membedakan agama sebagaimana sesuatu yang diturunkan Tuhan sebagai sumbernya, dengan agama sebagai hasil pemahaman terhadap kitab suci yang diturunkan Tuhan tersebut. Akibatnya tidak jelas antara ajaran murni yang absolut dengan pemahaman manusia yang relatif. Keduanya sering dianggap sama-sama absolut, hingga tertutup untuk kritik.

Kedua, teosentris. Kelompok militan memiliki pandangan bahwa segala fenomena di dunia dianggap sebagai realitas yang *taken for granted* dan tidak dapat dihindari. Seluruh seluruh peristiwa kehidupan dianggap semata-mata sebagai kehendak absolut Tuhan, sementara manusia tidak memiliki kewenangan hakiki untuk merencanakan dan mengusahakan apapun. Di dalam Islam aliran ini dikenal dengan nama *Jabariah*. Dengan pemikiran ini, fungsi akal tidak lagi terlibat efektif untuk memahami realitas hidup.

Ketiga, konservatif. Orientasi pemikiran kelompok militan adalah masa lalu, dengan asumsi masa lalu adalah masa terbaik yang harus dikembalikan pada masa kini. Bahkan memiliki keyakinan bahwa komunitas manusia terbaik dan memperoleh hak

istimewa di mata Tuhan adalah komunitas masa lalu yang hidup berdampingan dengan para rasul dan nabi. Mereka ini yang menurut kelompok ini sebagai pemilik otoritas keagamaan. Karena itu, setiap upaya intelektual mereka adalah kebenaran yang tidak dapat ditinjau ulang pada masa kini. Ia menjadi semacam teks suci yang haram dikritik atau ditinjau ulang, apalagi diganti dengan *ijtihad-ijtihad* baru.

Keempat, eksklusif. Kecenderungan pemikiran kelompok militan ini adalah menganggap pemahaman mereka terhadap kitab suci sebagai hukum-hukum Tuhan yang harus diikuti dan tidak dapat diganti dengan hukum-hukum manusia. Mereka merasa satu-satunya pihak yang pemahamannya terhadap kitab suci paling benar sehingga merasa paling berhak menjelaskan dan menerapkan. Dengan sendirinya pemahaman kelompok lain yang tidak memiliki "*platform*" yang sama dengan mereka dianggap adalah pemikiran yang sesat dan tidak perlu diikuti. Seolah merekalah satu-satunya pemegang lisensi ajaran Tuhan secara mutlak.

Keempat karakter pemikiran semacam inilah yang diidentifikasi oleh Syarqowi sebagai enegsi ideologis yang menggerakkan kelompok-kelompok militan dalam Islam. Ketika pemikiran-pemikiran yang dihasilkan diterapkan dalam ranah politik, maka kekerasan dan teror sering menjadi tindakan yang tak terhindarkan. (Syarqowi: 9-3-2006).

Dari uraian teoretik di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan pendidikan berwawasan multikultural ini mendesak diselenggarakan dikarenakan era globalisasi yang memaksa individu manapun untuk bersentuhan dan berinteraksi dengan ragam budaya lain membutuhkan modalitas mental yang akan menjamin ketercapaian idealitas tujuan pendidikan dalam apa yang biasa dikonsepsikan sebagai "manusia setutuhnya". Dalam konteks tersebut maka sesungguhnya sikap multikultural dipandang bukan

sebagai suatu sikap akomodatif dan fleksibel yang tanpa ketegasan (“sikap” itu sendiri). Melainkan sebaliknya, ia sebagai modal personal (jati diri) yang akan memungkinkannya secara tepat dalam merespon beragam stimulus gejala sosial-budaya (*socio-culture symptoms*) secara selektif dan efisien.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian

Pondok diartikan sebagai sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan kiai, (Dhofier: 1982). Menurut Raharjo pondok bukanlah orisinal berasal dari tradisi Islam melainkan terdapat percampuran antara berbagai budaya sebagai mana dikemukakan bahwa pondok merupakan hasil penerapan akulturasi dari masyarakat Indonesia dengan kebudayaan Hindu Budha, kemudian kebudayaan Islam selanjutnya menjelmakan menjadi lembaga yang lain dengan warna Indonesia, yang berbeda dengan apa yang dijumpai di India dan Arab, (Raharjo: 1974:67).

Adapun kata “pesantren” yang biasa dilekatkan pada pondok (bahkan nyaris menjadi kata majemuk) berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal santri, (Dhofier: 1982). Pesantren pada prinsipnya adalah sebuah asrama pendidikan tradisional dimana santri tinggal bersama dan belajar dalam bimbingan kiai, Pondok juga dikenal sebagai asrama adalah ciri khas dari tradisi pesantren, yang membedakan dengan sistem dengan pendidikan formal. Menurut Dhofier ada tiga alasan utama pesantren harus menyediakan asrama: *pertama* kemasyhuran sang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam, hal tersebut menarik santri-santri dari jauh untuk tinggal di asrama. *Kedua*: hampir setiap pesantren berada di desa-desa yang

tidak tersedia perumahan (*akomodasi*) yang cukup untuk menampung santri, dengan demikian keberadaan asrama sangat perlu, *ketiga*: adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri, dimana para santri menganggap kiai seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus membimbingnya dan melindunginya.

2. Jenis Pondok Pesantren

terdapat dua jenis pondok pesantren, yaitu *salaf* atau *salafi* dan Modern atau *Khalaf*. Pesantren salafi memiliki arti, yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti dari pendidikan pesantren, sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem *sorogan* yang terdapat dalam lembaga-lembaga pengajaran pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengetahuan umum

Ciri-ciri dari pesantren salafi, pesantren ini tidak memperkenalkan pengetahuan umum, pesantren salafi biasanya berdomisili di desa, tidak menekankan aspek doktrin-doktrin tetapi pada dogma agama. karena itu bagi kelompok santri salafi ini etika hidup mereka merupakan cerminan dari etika dan perilaku Nabi Muhammad SAW, jika dibedakan dengan kelompok abangan maka secara keagamaan kelompok santri salafi memandang dirinya lebih tinggi dalam pemahaman dan kedalaman ilmu agamanya (Raharjo: 1985:45).

Ciri menonjol lainnya dari pesantren salafi adalah pola pembelajarannya yang masih menggunakan metode atau sistem "*sorogan*" (sistem setoran), hapalan kitab-kitab dan teks-teks Arab, dan metode pengajiannya masih melaksanakan pengajian gaya wetonan atau (bandongan) proses pengajian ini yaitu: mendengarkan, menerjemahkan, membaca, dan seringkali mengulas kitab-kitab Islam klasik dalam Bahasa Arab.

Adapun pesantren modern dikenal oleh coraknya yang akomodatif terhadap hal-hal yang baru. Ciri-ciri pesantren modern adalah telah menerapkan sistem pendidikan modern sebagaimana halnya yang dikenal dengan persekolahan (*schooling*). Maka menjadi ciri umum bagi jenis pondok pesantren ini yang menyelenggarakan sekolah Taman Kanak-kanak (RA, TPA, TKA), Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah/MI), Sekolah Lanjutan Pertama (Madrasah Tsanawiyah/MTS), Sekolah Menengah Umum (Madrasah Aliyah), Perguruan tinggi atau universitas.
